

**FAKTOR PENENTU PARTISIPASI PETANI PADA PROGRAM UPAYA KHUSUS
(UPSUS) PADI DI KABUPATEN MANOKWARI, PAPUA BARAT**

***Participation Determinant Factors on Special Effort Program (UPSUS) in
Regency of Manokwari, West Papua***

Oeng Anwarudin*

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Manokwari
*Korespondensi penulis. E-mail: oenganwarudin@gmail.com

Diterima: Februari 2017

Disetujui terbit: April 2017

ABSTRACT

Villagers with a majority of people living in livelihoods as farmers are still the main pockets of poverty. Efforts to reduce poverty have been done through special rice program to support food self-sufficiency and improve farmers' welfare. The objective of the study is to analyze descriptively the participation of farmers in the rice special efforts program, to analyze factors related to participation. The research was conducted at Masni, Manokwari, West Papua in 2015. The sample of this research is farmers who are members of farmer group and farmer group association as many as 60 people using stratified random sampling technique. Data were analyzed using descriptive statistics and correlation analysis. The results of research on farmer participation rate is high. Social status, economic status, innovative behavior and economic morale of farmers can be a determinant of farmer participation. The strengthening of farmer groups, combined farmer groups and the involvement of relevant agencies can be a determinant of farmers participation. Extension worker and external companions can be a determinant of peasant participation. Participation of farmers is also determined by the program factors of special efforts of rice.

Keywords: *participation, special efforts of rice, farmer groups, extension workers*

ABSTRAK

Desa dengan mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani masih menjadi kantong utama kemiskinan. Upaya mengurangi kemiskinan telah dilakukan melalui program upaya khusus padi untuk mendukung swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian bertujuan menganalisis secara deskriptif partisipasi petani dalam program upaya khusus padi, menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi. Penelitian telah dilaksanakan di Distrik Masni, Manokwari, Papua Barat pada 2015. Sampel penelitian adalah petani yang menjadi anggota kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebanyak 60 orang menggunakan teknik *stratified random sampling*. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis korelasi. Hasil penelitian mengenai tingkat partisipasi petani adalah tinggi. Status sosial, status ekonomi, perilaku inovatif dan moral ekonomi petani dapat menjadi penentu partisipasi petani. Penguatan kelompok tani, gabungan kelompok tani dan keterlibatan dinas terkait dapat menjadi faktor penentu partisipasi petani. Penyuluh pendamping dan pendamping eksternal dapat menjadi penentu partisipasi petani. Partisipasi petani juga ditentukan oleh faktor program yaitu upaya khusus padi.

Kata kunci: *partisipasi, program upaya khusus padi, kelompok tani, penyuluh pendamping*

PENDAHULUAN

Desa dengan mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani masih tetap menjadi kantong utama kemiskinan. Persentase kemiskinan hingga saat ini masih lebih besar terjadi di pedesaan dibanding perkotaan. Badan Pusat Statistik (2015) menampilkan penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2014, 14,17 persen tinggal di pedesaan lebih besar dibanding 8,34 persen yang tinggal di perkotaan. Selanjutnya September 2014 penduduk miskin di Indonesia, 13,76 persen di pedesaan berbanding terbalik 8,16 persen di perkotaan. Demikian juga pada Maret 2015 penduduk miskin di Indonesia, 14,21 persen tinggal di pedesaan masih lebih besar daripada 8,28 persen yang tinggal di perkotaan. Realita kemiskinan di pedesaan tersebut selalu menjadi isu penting untuk segera dicari solusi pemecahannya.

Beberapa negara telah membuktikan bahwa penyuluhan yang memberdayakan telah terbukti mampu mengurangi kemiskinan di pedesaan (Eastwood *et al* 2017, Hauser *et al* 2016). Pemberdayaan tersebut mengedepankan partisipasi petani dalam setiap kegiatan dan program (Hauser *et al* 2016). Belajar dari pengalaman ini, paradigma pembangunan pertanian dan perdesaan di Indonesia sebenarnya sudah memperhatikan konsep pemberdayaan bahkan sejak era otonomi daerah dimulai. Pada bidang pertanian, pemberdayaan berjalan selaras dengan kegiatan penyuluhan sehingga menjadi penyuluhan yang memberdayakan.

Pada kegiatan penyuluhan yang memberdayakan ini, partisipasi petani menjadi pilar keberhasilan penyuluhan. Partisipasi petani merupakan komponen yang paling krusial dalam mengelola dan melestarikan program. Partisipasi

petani dalam kegiatan pemberdayaan diharapkan selalu terpacu, konsisten dan terpelihara. Rai dan Smucker (2016) menyatakan bahwa partisipasi minimal harus memenuhi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Untuk menciptakan ketahanan pangan dan swasembada pangan mulai tahun 2008, Kementerian Pertanian dalam mengembangkan program bersama petani berusaha mengedepankan konsep pemberdayaan. Program pemberdayaan yang pernah bergulir yaitu Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan dilanjutkan dengan program upaya khusus (UPSUS) padi sebagai bagian dari program UPSUS PAJALE (Padi, Jagung dan Kedelai) pada tahun 2015. Program ini merupakan terobosan Kementerian Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar subsektor.

Partisipasi dalam program UPSUS padi menjadi komponen penting untuk dikedepankan. Namun demikian, partisipasi tidak serta merta terjadi melainkan senantiasa ada faktor-faktor pemicunya. Penelitian bertujuan menganalisis secara deskriptif tingkat partisipasi petani dalam mendukung swasembada pangan melalui program UPSUS padi dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Waktu kegiatan penelitian pada Juli sampai dengan Agustus 2015.

Jenis penelitian ini adalah penelitian survai yang mengambil data

dari sejumlah individu yang representatif mewakili populasinya. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris untuk menemukan keterkaitan suatu variabel dengan variabel yang lain. Selanjutnya menurut sifatnya penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang memusatkan pada pengumpulan data kuantitatif yang berupa angka-angka untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistika.

Populasi penelitian ini adalah petani yang menjadi anggota kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Karena besarnya jumlah individu pada populasi, dalam penelitian ini dilakukan pengambilan sampel. Berdasarkan teknik *stratified random sampling*, banyaknya sampel dalam penelitian ini 60 (enam puluh) orang.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui pengumpulan data yang menggunakan kuesioner. Sedangkan

Tabel 1. Distribusi tingkat partisipasi petani dalam mendukung ketahanan pangan melalui program upaya khusus padi

No.	Responden		Kategori
	Orang	%	
1.	23	38,33	Sangat Tinggi
2.	17	28,33	
3.	20	33,33	Rendah
4	-	-	Sangat Rendah
Total	60	100	Tinggi

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai tengah tingkat partisipasi petani berada pada kriteria tinggi. Namun demikian bila dilihat dari distribusi responden porsi partisipasi petani ternyata paling besar berada pada kategori sangat tinggi (38,33%), disusul rendah (33,33%) dan tinggi (28,33%). Data tersebut menunjukkan bahwa responden tersebar pada tingkat partisipasi rendah sampai sangat tinggi. Namun demikian nilai tengah partisipasi petani berada pada kategori tinggi. Hasil penelitian yang memperlihatkan adanya partisipasi petani yang bervariasi

data sekunder berupa monografi desa, dokumen dan foto kondisi desa dan gabungan kelompok tani atau kelompok tani yang sebelumnya sudah tersedia yang mendukung kegiatan penelitian. Sumber data primer adalah responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari balai desa, gabungan kelompok tani atau kelompok tani dan lembaga/dinas terkait. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dan analisis korelasi *rank spearman*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Petani

Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, diperoleh data partisipasi petani. Sebaran data, deskripsi data penelitian variabel partisipasi petani tersaji pada Tabel 1.

cenderung kearah tinggi diharapkan dapat berpotensi positif pada proses pemberdayaan sehingga memperkuat pernyataan Taylor dan Grieken (2015) bahwa partisipasi merupakan komponen penting sebagai pembangkitan kemandirian dalam proses pemberdayaan.

Adanya partisipasi petani yang cenderung kearah tinggi diharapkan dapat berimbas pada kesejahteraan petani sebagaimana Rai dan Smucker (2016) menyatakan bahwa partisipasi merupakan alat pemberdayaan masyarakat petani untuk meningkatkan

kesejahteraan hidupnya. Partisipasi seseorang sebagai elemen penting yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap pentingnya teknologi. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa partisipasi merupakan kegiatan internal petani sebagai apresiasi dan alat pemberdayaan untuk mewujudkan inisiatif, pengendalian dan koreksi kegiatan, efektifitas pembiayaan, kegiatan yang lebih akurat dan relevan. Melalui partisipasi dalam kelompok tani menurut Ofuoku and Isife (2009) muncul rasa saling memahami diantara anggota kelompok yang berorientasi pada fokus kepentingan ekonomi dan menjaga nilai,

budaya dan kekuatan kelompok. Dengan demikian partisipasi petani dalam kelompok tani mampu mengantarkan kelompok tani pada kemandiriannya.

Hubungan Faktor Internal dengan Partisipasi Petani

Faktor internal pada penelitian ini meliputi umur, status sosial, status ekonomi, perilaku inovatif dan moral ekonomi. Hasil analisis statistik melalui uji korelasi antara faktor internal dengan partisipasi petani seperti tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Hubungan antara faktor internal dengan partisipasi petani

Uraian	Koefisien	p-value	Keterangan
Korelasi antara umur dengan partisipasi	0,06	0,240	Tidak berhubungan
Korelasi antara status sosial dengan partisipasi	0,76	0,003	Memiliki hubungan
Korelasi antara status ekonomi dengan partisipasi	0,32	0,046	Tidak berhubungan
Korelasi antara perilaku inovatif dengan partisipasi	0,78	0,008	Memiliki hubungan
Korelasi antara moral ekonomi dengan partisipasi	0,58	0,016	Memiliki hubungan

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa beberapa variabel memiliki hubungan dengan partisipasi petani. Variabel tersebut adalah status sosial, status ekonomi, perilaku inovatif dan moral ekonomi. Hubungan tersebut bersifat positif yang bermakna adanya hubungan searah atau sebanding. Semakin tinggi status sosial petani maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi petani tersebut dalam UPSUS padi. Hal yang sama terjadi juga pada status ekonomi, perilaku inovatif dan moral ekonomi seorang petani dimana semakin tinggi status, perilaku dan moralnya maka tingkat partisipasi petani akan semakin tinggi. Nilai koefisien korelasi diantara variabel tersebut bervariasi. Semakin tinggi nilai koefisien tersebut, maka hubungan diantara keduanya semakin erat.

Status sosial dan ekonomi yang di dalamnya terdapat tingkat

pendidikan, besarnya pendapatan dan status sosial pada masyarakat menjadi faktor penentu berhubungan erat dengan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini sama dengan temuan Agboola *et al* (2015) dan Tewodros (2015) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik sosial ekonomi petani dengan partisipasi praktik pertanian. Sehubungan dengan tingkat pendidikan, Minh *et al* (2014) secara sederhana menyatakan bahwa hakekat pendidikan adalah untuk meningkatkan kemampuan manusia agar dapat mempertahankan atau bahkan memperbaiki mutu keberadaannya agar menjadi semakin baik. Pada tataran filosofis, proses belajar merupakan upaya pembangunan manusia seutuhnya atau untuk memanusiakan manusia. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk untuk menggali dan mengembangkan

keunggulan-keunggulan manusia (yang belajar), baik sebagai individu maupun sebagai (anggota) komunitas.

Selanjutnya mengenai perilaku inovatif yang berhubungan erat dengan partisipasi petani, Mardikanto (2009) menjelaskan bahwa sifat inovatif merupakan keinginan untuk menggali/mencari, menemukan atau menerapkan ide-ide baru maupun yang bersifat petualangan sehingga dengan sendirinya akan muncul dalam jiwa petani untuk berusaha ikut terlibat atau ambil bagian dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Menurut Tewodros (2015) rumah tangga yang partisipasinya tinggi dapat mengadopsi inovasi sehingga sifatnya menjadi lebih inovatif dan lebih dapat bertahan jika ada guncangan cuaca dan harga.

Mengenai moral ekonomi petani yang berhubungan sangat erat dengan partisipasi petani menunjukkan bahwa semakin seorang petani bersikap rasional maka partisipasinya semakin tinggi dan sebaliknya bila masih bersikap subsisten maka partisipasinya

semakin rendah. Eastwood *et al* (2017), secara panjang lebar mengungkapkan bahwa petani subsisten pada dasarnya mengutamakan selamat dan tidak mau melakukan perubahan-perubahan. Setiap alternatif perubahan selalu dipandang sebagai sesuatu yang mengandung resiko yang justru akan memperburuk keadaannya yang sudah buruk. Berbeda dengan ciri-ciri petani subsisten, Hauser *et al* (2016) justru mengemukakan bahwa petani rasional selalu ingin memperbaiki nasibnya, dengan mencari dan memilih peluang-peluang yang mungkin dapat dilakukannya.

Hubungan Faktor Kelembagaan dengan Partisipasi Petani

Faktor kelembagaan terdiri dari penguatan kelompok tani, penguatan gabungan kelompok tani dan keterlibatan dinas terkait. Hasil analisis statistik melalui uji korelasi antara faktor kelembagaan dengan partisipasi petani tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Hubungan antara faktor kelembagaan dengan partisipasi petani

Uraian	Koefisien	p-value	Keterangan
Korelasi antara penguatan kelompok tani dengan partisipasi petani	0,84	0,004	Memiliki hubungan
Korelasi antara penguatan gabungan kelompok tani dengan partisipasi petani	0,74	0,011	Memiliki hubungan
Korelasi antara keterlibatan dinas terkait dengan partisipasi petani	0,60	0,013	Memiliki hubungan

Berdasarkan hasil uji korelasi, diketahui bahwa faktor kelembagaan yang meliputi penguatan kelompok tani, penguatan gabungan kelompok tani dan keterlibatan dinas terkait memiliki hubungan yang sangat erat dengan partisipasi petani. Hasil uji korelasi memperlihatkan bahwa hubungan tersebut bersifat positif yang bermakna adanya hubungan searah atau sebanding. Semakin tinggi penguatan kelompok tani dan penguatan gabungan kelompok tani maka semakin

tinggi pula tingkat partisipasi petani tersebut dalam UPSUS padi. Hal yang sama terjadi juga pada dinas terkait dimana semakin tinggi keterlibatannya maka tingkat partisipasi petani akan semakin tinggi. Nilai koefisien korelasi diantara variabel tersebut sangat tinggi yang menunjukkan hubungan diantara keduanya sangat erat.

Penguatan kelompok tani memiliki kegiatan berupa peningkatan kemampuan menganalisis pasar dan peluang usaha, peningkatan

kemampuan menganalisis potensi wilayah, peningkatan kemampuan mengelola usaha tani secara komersial dan melaksanakan kegiatan simpan pinjam untuk modal usaha yang sekaligus merupakan indikator dalam penelitian ini. Indikator tersebut diduga menjadi pemicu tumbuhnya jiwa wira usaha sehingga mampu merangsang partisipasi petani. Harapan berikutnya petani menjadi semakin mandiri seperti penelitiannya Anwarudin dan Maryani (2017) bahwa penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani dapat menjadikan petani lebih mandiri bahkan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan (Okpukpara 2009). Tambunan (2009) mengemukakan bahwa membangun jiwa kewirausahaan merupakan proses awal untuk usaha yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga dipertegas oleh Otieno *et. al.*, (2009) yang mengemukakan bahwa tergabungnya petani dalam kelompok sebagai wadah yang penuh kerjasama, dapat mengurangi pembiayaan dan petani menjadi bertambah kuat dalam upaya meningkatkan keuntungan dan mencegah terjadinya kerugian. Dengan demikian usaha pertanian menjadi lebih menguntungkan dan mempunyai daya saing sehingga mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak dan menjadikan petani yang mandiri.

Hasil penelitian ini memperkuat pernyataan Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) bahwa dalam pembangunan, peran organisasi kemasyarakatan lokal harus diorganisasikan secara hierarkis agar informasi tentang situasi terkini dapat dijalin secara multiarah, baik vertikal maupun horisontal. Hasil penelitian dapat membuktikan bahwa kelompok tani dan gabungan kelompok tani sebagai organisasi kemasyarakatan lokal mampu meningkatkan jalinan hubungan secara horisontal dengan petani sehingga memiliki hubungan signifikan terhadap partisipasi petani. Hasil penelitian ini yang membuktikan adanya keterkaitan kelompok tani dan

gabungan kelompok tani terhadap partisipasi petani yang menunjukkan bahwa organisasi kemasyarakatan berperan dalam mendampingi petani baik sebagai inisiator, katalisator maupun fasilitator.

Terkait dengan program, sehubungan dengan responden penelitian ini adalah peserta Program Usaha Khusus (UPSUS) yang terintegrasi dengan program pemberdayaan *by goverment*, kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta dinas terkait selaras dengan yang telah dikemukakan lfe (2002) bahwa kekuatan kelembagaan yang dimiliki masyarakat penting dan dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Taylor dan Grieken (2015) mengemukakan bahwa konsep pemberdayaan dalam wacana pengembangan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep partisipasi. Partisipasi inilah yang menurut Jones *et al* (2014) berguna menanggulangi berbagai masalah seputar kemiskinan dan pengangguran. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan adalah menekankan pada pembangkitan kesadaran dan daya kreasi penduduk setempat sehingga mereka mau dan mampu mencari cara-cara untuk memecahkan persoalan mereka sendiri.

Adanya hubungan kelompok tani dan gabungan kelompok tani dengan partisipasi petani menjadi perhatian tentang pentingnya partisipasi itu sendiri yang menurut Rai dan Smucker (2016) merupakan alat pemberdayaan masyarakat petani untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Pemberdayaan menempatkan orang sebagai pusat yang menggambarkan kapasitas masyarakat lokal terhadap pentingnya teknologi. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa partisipasi merupakan kegiatan internal petani sebagai apresiasi sebagai alat pemberdayaan dalam hal inisiatif, pengendalian dan koreksi kegiatan, efektifitas pembiayaan, kegiatan lebih akurat dan relevan.

Melalui partisipasi dalam kelompok tani menurut Ofuoku and Isife (2009) muncul rasa saling memahami diantara anggota kelompok yang berorientasi pada fokus kepentingan ekonomi dan menjaga nilai, budaya dan kekuatan kelompok.

Mengingat pentingnya partisipasi petani dalam pengembangan masyarakat sebagaimana dikemukakan Jones *et al* (2014) bahwa pengembangan masyarakat dipandang sebagai wahana mobilisasi penduduk pedesaan agar terlibat dalam berbagai program pembangunan karena keterlibatan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai kemampuan mereka untuk membangun lingkungannya sendiri. Demikian juga Soetomo (2006) mengemukakan prinsip umum pengembangan masyarakat adalah mengutamakan partisipasi masyarakat dan Minh *et al* (2014) yang menyebutkan bahwa dalam pengembangan masyarakat penting adanya partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama (*group action*) didalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat. Begitu pentingnya partisipasi dalam pengembangan masyarakat sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkannya. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi petani adalah melalui kelompok tani.

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah masyarakat pedesaan peserta Program Usaha Khusus (UPSUS) yang merupakan bagian dari Program Pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian, tantangan utama yang dihadapi dalam memberdayakan

masyarakat pedesaan adalah pengetahuan yang terbatas, wilayah yang berada di pinggiran dan pemahaman adat yang masih kuat. Usaha melakukan perubahan pada kondisi masyarakat seperti ini dapat dilakukan dengan memahami pemikiran dan tindakan masyarakat serta kepercayaan kepada pelaku pemberdaya. Selanjutnya mereka perlu berpartisipasi dalam proses perubahan yang ditawarkan dengan memberikan kesempatan menentukan pilihan secara rasional. Proses ini memberikan hasil yang lebih efektif dari pada memberikan pilihan yang sudah ditentukan. Langkah untuk melakukan semua proses tersebut menurut Zubaedi (2007) pertama kali harus membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pada masyarakat desa berbasis pertanian, kelompok swadaya masyarakat adalah kelompok tani yang merupakan wahana kegiatan belajar-mengajar, tempat diskusi identifikasi dan pemecahan masalah, penyusunan rencana kegiatan dan peningkatan kemampuan bidang pertanian. Oleh karenanya pengembangan yang dilakukan dapat membuka akses pada informasi, memberikan penjelasan mengenai program-program pemerintah yang sedang dilaksanakan, norma-norma bermasyarakat yang perlu diketahui, hak-hak masyarakat yang melindungi, dan manfaat perubahan. Dengan demikian kelompok tani dapat meningkatkan partisipasi petani.

Faktor Pendamping

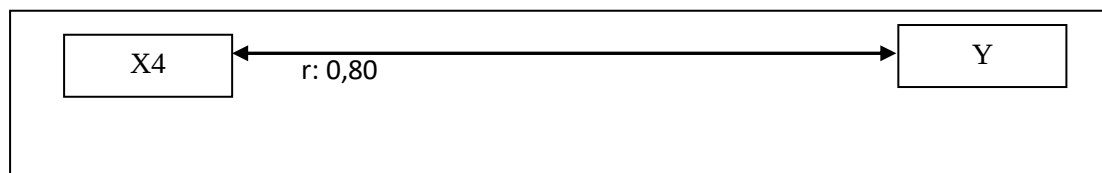
Faktor pendamping meliputi penyuluh pendamping dan pendamping ekstern (babinsa). Hasil analisis statistik melalui uji korelasi antara faktor pendamping dengan partisipasi petani seperti tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Hubungan antara faktor pendamping dengan partisipasi petani

Uraian	Koefisien	p-value	Keterangan
Korelasi antara penyuluh pendamping dengan partisipasi petani	074	0,011	Memiliki hubungan

Korelasi antara keterlibatan babinsa dengan partisipasi petani	0,70	0,019	Memiliki hubungan
Keterangan:	pendamping perlu diperbaharui kegiatan teknisnya menjadi pendampingan petani sebagai pelaku utama program. Pelatihan dan pendampingan adalah dua kegiatan yang berbeda. Pelatihan sering kali memiliki mekanisme waktu yang sangat terbatas, tertentu dan kurang cocok bila dilaksanakan untuk petani. Pelatihan sering juga terikat kegiatan proyek “ada pelatihan karena ada proyek”. Pendampingan akan lebih cocok karena tidak terbatas waktu, kapan saja dan dimana saja. Pendampingan juga lebih menekankan pada dominasi petani atau petani lebih banyak berperan karena disini pendamping hanya mendampingi dan memfasilitasi. Kaitannya dengan aspek pengembangan masyarakat yang berbasis pemberdayaan, untuk kegiatan di lapangan, kegiatan yang harus dilakukan adalah pendampingan bukan pelatihan. Bila ada kegiatan pelatihan, kegiatan tersebut harus berasal dari inisiatif dan dilakukan oleh masyarakat sendiri bukan ditentukan dari ‘atas’ seperti yang dikemukakan Mabuza <i>et al</i> (2012).		
Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara faktor pendamping secara terinci berdasarkan faktor penyusunnya (penyuluh pendamping dan babinsa) dengan partisipasi petani. Hubungan positif diantara variabel-variabel tersebut bermakna adanya hubungan searah atau sebanding. Semakin tinggi kinerja penyuluh pendamping maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi petani tersebut dalam usaha agribisnis pedesaan. Tabel 4 menunjukkan bahwa baik penyuluh pendamping maupun keterlibatan babinsa memiliki andil terhadap partisipasi petani artinya dapat menjadi faktor penentu bagi peningkatan partisipasi petani. Hal ini diduga terkait dengan Program Upaya Khusus (UPSUS) memiliki strategi operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Melihat strategi operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, beberapa solusi sebagai masukan untuk program tersebut adalah pelatihan bagi petani sebagai pelaku UPSUS oleh penyuluh			

Faktor Program



Keterangan:

X4 : Faktor program

Y : Partisipasi petani

Gambar 1. Hubungan Faktor Program dengan Partisipasi Petani

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara faktor program dengan partisipasi

petani. Hubungan positif diantara variabel tersebut bermakna adanya hubungan searah atau sebanding.

Semakin tinggi kinerja program maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi petani tersebut. Program upaya khusus padi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Kementerian Pertanian yang memberdayakan, dalam rangkaian prosesnya dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yang harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan partisipasi petani. Kajian mengenai program upaya khusus padi sebagai program pemberdayaan masyarakat yang mampu menimbulkan partisipasi petani ditujukan pada latar belakang program, tahapan program, langkah-langkah program, prinsip program, dan solusi terhadap kelemahan program tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan tujuannya, program upaya khusus padi memenuhi perspektif keadilan sosial sebagai pondasi pengembangan masyarakat sebagaimana telah dikemukakan lfe bahwa persepektif keadilan sosial yang menjadi dasar pengembangan masyarakat adalah kesenjangan (*disanvantage*), pemberdayaan (*empowerment*), kebutuhan (*need*) dan hak. Terlihat jelas bahwa program upaya khusus padi memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan fungsi kelembagaan yang dilatarbelakangi oleh terjadinya kesenjangan, kemiskinan dan pengangguran walaupun yang sangat tampak adalah ambisi pemerintah mengejar swasembada pangan.

Berdasarkan tahapannya, program upaya khusus padi perlu memperhatikan pernyataan Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) bahwa sebagai proses, pengembangan masyarakat mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Pertama penyadaran, penyusunan rancangan upaya khusus padi di suatu desa seharusnya dilakukan dengan menerapkan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yang dilakukan terutama oleh penyuluh

pendamping setempat dengan masyarakat. PRA merupakan istilah yang diberikan kepada pendekatan yang menggunakan metode partisipatif dengan menekankan kepada pengetahuan lokal dan kemampuan masyarakat untuk membuat penilaian sendiri, menganalisis sendiri, dan merencanakan sendiri. PRA memfasilitasi proses saling berbagai informasi (*information sharing*), analisis, dan aktifitas antar *stakeholders*. Upaya ini membantu masyarakat mendapatkan pencerahan untuk mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka sendiri.

Kedua pemberian kapasitas, pengkapasitasan dalam program upaya khusus padi ditandai dengan terbentuknya gabungan kelompok tani (Gapoktan). Pengembangan Gapoktan merupakan tindak lanjut dari adanya kesadaran pentingnya menggabungkan beberapa kelompok tani yang penyebabnya dapat berupa kenyataan lemahnya aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi pertanian, serta terhadap sumber informasi. Pada prinsipnya, lembaga Gapoktan diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, namun diharapkan juga mampu menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Terhadap pedagang saprotan maupun pedagang hasil-hasil pertanian, Gapoktan diharapkan dapat menjalankan fungsi kemitraan dengan adil dan saling menguntungkan. Dalam program ini, Gapoktan diharapkan meningkat kemampuannya untuk menjadi lembaga tingkat desa yang mengorganisir kelompok-kelompok tani. Gapoktan pula yang seharusnya mengajukan program upaya khusus padi. Dalam pemberian kapasitas ini selain organisasi, terdapat pula pemberian kapasitas manusia dan sistem nilai. Manusia yang dimaksud adalah anggota kelompok tani yang

tergabung dalam Gapoktan. Gapoktan harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola usaha agribisnis dan memiliki struktur kepengurusan yang aktif. Sementara sistem nilai adalah aturan main, peraturan dan kesepakatan yang dimiliki oleh Gapoktan. Ketiga pendayaan, pada tahap ini pemberian daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Gapoktan yang telah menerima kapasitas, terlibat didalam program upaya khusus padi.

Berdasarkan langkah-langkahnya, upaya khusus padi dimulai dari adanya kelompok-kelompok tani yang selanjutnya bergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Diharapkan kelompok tani ini merupakan kelompok swadaya masyarakat yang benar-benar mengerti pentingnya berkelompok. Demikian pula paham dan sadar untuk bergabung dengan kelompok tani membentuk komunitas yang lebih besar melalui gabungan kelompok tani (Gapoktan). Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Zubaedi (2007) bahwa langkah pertama dalam pengembangan masyarakat adalah terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Melalui kelompok, masing-masing individu belajar, menumbuhkan kesadaran dan menggali kepentingan bersama. Langkah berikutnya adalah membangkitkan partisipasi masyarakat, memupuk dan mengembangkan mekanisme musyawarah dan membangun jaringan lokal sebagai mitra kerja.

Berdasarkan prinsip-prinsipnya, program upaya khusus padi seharusnya yang memiliki prinsip-prinsip bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas, kolaborasi, keberlanjutan dan sederhana. Prinsip-prinsip tersebut merupakan sebagian dari 26 prinsip pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Jim Ife (2002). Prinsip tersebut juga didukung Soetomo

(2006) yang menyebutkan bahwa pengembangan masyarakat harus memiliki prinsip (1) fokus perhatian ditujukan pada komunitas sebagai suatu kebulatan, (2) berorientasi kepada kebutuhan dan permasalahan komunitas dan (3) mengutamakan prakarsa, partisipasi dan swadaya masyarakat.

Pertama, fokus perhatiannya adalah komunitas. Dalam dokumen kebijakan teknis upaya khusus padi, unit terkecil adalah berupa desa, bukan keluarga, ataupun individual. Artinya, seluruh warga dalam satu desa merupakan penerima atau pelaku aktif dari program upaya khusus padi, baik mereka yang merupakan menjadikan pertanian sebagai aktifitas ekonomi utama maupun warga desa yang bekerja di sektor *off farm* maupun *non farm*. Dengan menetapkan desa sebagai unit terkecil, maka seluruh tahapan proses nantinya mesti melibatkan seluruh warga desa. Dalam dokumen kebijakan teknis Upaya Khusus upaya khusus padi terlihat, bahwa kelembagaan agribisnis tersebut menjadikan warga satu desa sebagai pelaku utama yang akan menggerakkan, meskipun kemudian memang harus menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lain di luar desa. Secara teoritis, sekelompok orang dalam satu desa dapat dipandang sebagai sebuah komunitas. Desa masih dapat dipandang sebagai sebuah komunitas dalam derajat tertentu, yang misalnya terlihat dari tingginya ikatan-ikatan sosial sesama warga sedesa. Selain itu, berbagai keputusan politik masih berada di tingkat desa, karena desa merupakan unit formal terkecil yang diakui dalam birokrasi pemerintahan.

Kedua, berorientasi kepada kebutuhan dan permasalahan komunitas. Program upaya khusus padi yang diusulkan seharusnya berasal dari masyarakat. Dengan demikian program-program usulan yang menjadi program upaya khusus padi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang

mengusulkan. Masing-masing Gapoktan yang mengusulkan program disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat dan dapat berbeda antara Gapoktan yang satu dengan Gapoktan di tempat lain.

Ketiga, mengutamakan prakarsa, partisipasi dan swadaya masyarakat. Sejalan dengan penggunaan konsep komunitas, maka program upaya khusus padi juga seharusnya berupaya mengembangkan prakarsa, partisipasi dan swadaya bagi warga desa untuk dapat melanjutkan sendiri aktifitas yang telah dimulai yang sebelumnya didukung oleh berbagai pihak luar. Penyusunan rencana lapang yang dieksplorasi dengan metode PRA merupakan upaya untuk menimbulkan sikap dan kemampuan untuk mengelola diri sendiri. Dalam PRA, dokumen aksi yang berhasil disusun merupakan milik dari warga desa. Artinya, mereka memiliki ikatan mental untuk merealisasikan dokumen tersebut secara mandiri. Jika bantuan dari pihak luar telah berkurang, maka mereka sendiri harus mampu menggali potensi-potensi baik dari dalam maupun dari luar komunitas. Untuk menunjang kemandirian, program pemberdayaan seharusnya menghindari pemberian bantuan yang tidak mendidik dan menimbulkan ketergantungan. Pemberian bantuan kepada petani seharusnya hanya berupa stimulan untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin yang diatur pertanggungjawabannya dan akan diaudit penggunaannya.

Hal-hal yang masih diragukan yang menjadi kelemahan program ini dipandang dari perspektif pengembangan masyarakat dan upaya solusi atau antisipasinya adalah sebagai berikut. Pertama, masih diragukan adanya kesinambungan program upaya khusus padi tersebut sebagai kegiatan swadaya. Melihat kebijakan teknis yang dikemukakan, program ini terlalu banyak

intervensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya memang disadari bahwa melaksanakan program melalui intervensi eksternal yang berorientasi pengembangan masyarakat tidak mudah untuk berdampak pada proses keberkelanjutan. Program dari pihak eksternal baik pemerintah maupun non pemerintah memang dapat mendorong tumbuhnya aktivitas lokal, tetapi aktivitas tersebut berhenti setelah program dari luar juga berhenti. Program yang diharapkan dapat mewujudkan proses berkelanjutan memerlukan waktu dan proses bertahap karena harus melalui belajar. Solusi dan antisipasi untuk keraguan ini adalah keterlibatan pihak eksternal tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari proses membina dan mengembangkan kemampuan dan potensi masyarakat sehingga sifatnya bukan merupakan faktor yang dominan tetapi sekedar mendorong, memberi stimulan, memfasilitasi dan ikut memberikan iklim yang kondusif bagi perkembangannya potensi dari dalam. Oleh karenanya menurut Soetomo (2006) kondisi yang semestinya dilakukan adalah pihak eksternal mampu mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan untuk membangun dirinya sendiri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kedua, masih diragukan bahwa program upaya khusus padi akan membentuk kemandirian berusaha. Salah satu yang mengurangi keswadayaan dalam program ini adalah adanya bantuan untuk petani. Solusi dan antisipasinya adalah harus ada upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa program tersebut memiliki aspek manfaat yang lebih besar untuk kepentingan bersama dari pada hanya untuk mendapatkan dana bantuan. Penyadaran menjadi penekanan untuk kondisi ini seperti yang disampaikan Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007).

Ketiga, mengenai pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), disini terlihat bahwa, pembentukan

Gapoktan bias kepada kepentingan “atas”, yaitu sebagai “kendaraan” untuk menyalurkan dan menjalankan berbagai kebijakan dari luar desa dalam hal ini Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah. Pembentukan Gapoktan, meskipun nanti dapat saja menjadi lembaga yang mewakili kebutuhan petani sebagai lembaga yang representatif, namun sebagian yang terjadi awal terbentuknya bukan dari kebutuhan internal secara mengakar. Ini merupakan gejala yang berulang sebagaimana dulu sering terjadi, yaitu hanya mementingkan pendirian belaka untuk mengejar proyek. Oleh karenanya antisipasi harus dilakukan melalui senantiasa dibina dan dikawal hingga menjadi lembaga usaha yang mandiri, profesional dan memiliki jaringan kerja luas. Penekanan kemandirian organisasi ini menjadi benar-benar nantinya sebagai kelompok swadaya masyarakat sebagai mana telah disampaikan Zubaedi (2007).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi petani dalam mendukung swasembada pangan melalui Upaya Khusus (UPSUS) Padi di Kabupaten Manokwari adalah tinggi. Faktor internal yang meliputi status sosial, status ekonomi, perilaku inovatif dan moral ekonomi petani dapat menjadi penentu partisipasi petani tetapi faktor internal yang mengangkut karakteristik pribadi tidak dapat dijadikan sebagai penentu partisipasi petani. Faktor kelembagaan yaitu kelompok tani, gabungan kelompok tani dan dinas terkait dapat menjadi faktor partisipasi petani. Faktor pendamping yang meliputi penyuluh pendamping dan pendamping eksternal dapat menjadi penentu partisipasi petani. Demikian pula dengan faktor program yaitu program upaya khusus padi dapat menjadi penentu meningkatkan partisipasi petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Agboola AF, Adekunle IA, Ogunjimi SI. 2015. Assessment of youth participation in indigenous farm practices of vegetable production in Oyo State, Nigeria. *Journal of Agricultural Extension and Rural Development*. 7(3): 73-79. doi: 10.5897/JAERD2014.0590.
- Anwarudin O, Maryani A. 2017. The effect of institutional strengthening on farmer participation and self-reliance in Bogor Indonesia. *International Journal of Research in Social Sciences*. 7(4): 409-422.
- BPS. 2015. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2014-2015.
- Eastwood C, Klerkx L, Nettle R. 2017. Dynamics and distribution of public and private research and extension roles for technological innovation and diffusion: Case studies of the implementation and adaptation of precision farming technologies. *Journal of Rural Studies*. 49 (2017): 1-12. doi: 10.1016/j.jrurstud.2016.11.008.
- Hauser M, Lindtner M, Prehler S, Probst L. 2016. Farmer participatory research: Why extension workers should understand and facilitate farmers' role transitions. *Journal of Rural Studies*. 47 (2016): 52-61. doi: 10.1016/j.jrurstud.2016.07.007.
- Ife J. 2002. *Community Development, Community – base alternatives in an age of globalisation*. 2nd Edition. Pearson Education Australia Pty Limited.
- Jones K, Glenna L L, Weltzien E. 2014. Assessing participatory processes and outcomes in agricultural research for development from participants' perspectives. *Journal of Rural Studies*. 35(2014): 91-100. doi: 10.1016/j.jrurstud.2014.04.010.
- Mabuza ML, Ortmann GF, Wale E. 2012. Determinants of Farmers

- Participation in Oyster Mushroom Production in Swaziland: Implication for Promoting a non Conventional Agricultural Enterprise. *Journal of Agrecon*. 51 (4) 19-40. doi: 10.1080/03031853.2012.741203.
- Mardikanto T. 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. UNS Press: Surakarta.
- Minh T T, Friederichsen R, Neef A, Hoffmann V. 2014. Niche action and system harmonization for institutional change: Prospects for demand-driven agricultural extension in Vietnam. *Journal of Rural Studies*. 36(2014): 273-284. doi: 10.1016/j.jrurstud.2014.09.008.
- Ofuoku AU, Isife BI. 2009. Causes, Effect and Resolution of Farmers-nomadic Cattle Herders Conflict in Delta State, Nigeria. *International Journal of Sociology and Anthropology*. Vol. 1(2). pp. 047-054.
- Okpukpara B. 2009. Strategies for Effective Loan Delivery to Small-Scale Enterprises in Rural Nigeria. *Journal of Development and Agricultural Economics*. 1(2): 041-048.
- Otieno D C, Odhiambo DM, Mairura M O. 2009. Economics Evaluation of Relative Profitability in Small Hold Dairy Farms in Western Kenya. *Journal of Development and Agricultural Economics*. 1(2): 49-54.
- Rai P, Smucker T A. 2016. Empowering through entitlement? The micro-politics of food access in rural Maharashtra, India. *Journal of Rural Studies*. 45 (2016): 260-269. doi: 10.1016/j.jrurstud.2016.04.002.
- Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Tambunan T. 2009. Women Entrepreneurship in Asian Developing Countries: Their Development and Main Constraints. *Journal of Development and Agricultural Economics*. 1(2): 27-40.
- Taylor B M, Grieken M V. 2015. Local institutions and farmer participation in agri-environmental schemes. *Journal of Rural Studies*. 37 (2015): 10-19. doi: 10.1016/j.jrurstud.2014.11.011.
- Tewodros T. 2015. Extension programme participation and smallholder's livelihood: Evidencer from Awassa Zuria District, ANNPR, Ethiopia. *Journal of Agricultural Extension and Rural Development*. 7(5):150-155. doi: 10.5897/JAERD2013.0534.
- Wrihatnolo R, Dwidjowijoto RN. 2007. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif, Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Ar Ruzz Media.